



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA  
BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAHTAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyelarasan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 166);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan

pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2022 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2022 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022;

- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

#### Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2022 sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
  - c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja PD Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari
32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta pada  
tanggal 16 Agustus 2022  
Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI PURWAKARTA,



ANNIE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2022

Pi SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 61

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2018-2023 Capaian Renstra, analisis capaian kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2022 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta,  
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Purwakarta**



**Dr. Hj Nur Aisah Jamil, S.Ag., M.Pd**  
**NIP. 19740525 200801 2 002**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	I
Daftar Isi .....	Ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan .....	6
Renja Tahun 2021	
2.2. Analisis Kinerja Perangkat .....	18
Daerah	
2.3. Isu-Isu Penting .....	23
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
2.4. Review terhadap .....	24
Rancangan Awal RKPD	
2.5. Penelaahan Usulan dan .....	33
Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap .....	34
Kebijakan Nasional	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja .....	34
3.3. Program dan Kegiatan	
BAB IV	
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	44
BAB V	
PENUTUP .....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang strategis. Perencanaan tersebut tertuang dalam Perubahan Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019-2023 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Purwakarta Tahun 2019-2023

Perubahan Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
2. Perubahan Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

## 1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah :

1. UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 )
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
7. Undang – Undang Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
8. Undang – Undang Nomor : 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019 ;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018, tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

18. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor ..... 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

#### **1.3.1 Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka menacapai sasaran strategis.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 adalah sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengoprasionalkan rencana kerja (RENJA) Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah Daerah, serta memudahkan melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan

### **1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) .**

- **Bab. I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.4. Sistematika Penulisan

- **Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**



- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

- **Bab. III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan

- **Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

- **Bab V Penutup**

## **BAB. II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Renstra PD.**

Realisasi kinerja tercapai 100% hampir pada semua kegiatan pada tahun 2021, baik itu kegiatan teknis maupun kegiatan rutin.

Kegiatan - kegiatan yang tercapai adalah sbb:

1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah.
3. Pembinaan Kerukunan Umat beragama,
4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
5. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.
6. Pembinaan forum pembauran kebangsaan.
7. Penyuluhan kepada masyarakat.
8. Penyusunan administrasi bantuan parpol
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12. Penyediaan jasa administrasi keuangan
13. Penyediaan jasa kebersihan kantor
14. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
17. Pelayanan Administrasi Perkantoran
18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
20. Pemeliharaan rutin/bekala perlengkapan gedung kantor
21. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target capaian

kinerja dikarenakan adanya keterbatasan dalam penganggaran serta pemenuhan target-target prioritas guna mendukung pemenuhan target sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.999.724	5.817.100	83%	100%
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.994.069	6.581.787	94%	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.616.936.070	1.472.013.547	91%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.999.810	5.537.200	79%	100%
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.999.811	6.637.343	94%	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.480.000	55.400.000	99%	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.724	49.999.677	100%	100%
		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-
		penyediaan alat rumah tangga	49.994.452	49.613.303	99%	100%
		penyediaan bahan logistik	149.999.876	148.546.504	99%	100%
		penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	120.017.374	104.168.724	86%	100%
		fasilitas kunjungan tamu	19.950.000	19.950.000	100%	100%
		penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	149.640.000	55.370.000	37%	100%
		Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100.000.000	99.088.000	99%	100%
		penyediaan jasa surat menyurat	12.660.000	11.218.000	88%	100%

	penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	63.600.000	52.670.733	82%	100%
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	556.380.000	533.265.072	95%	100%
	penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	42.310.000	40.995.365	96%	100%
	pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	100.036.000	100.000.000	99%	100%
	pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	39.760.000	39.630.000	99%	100%

No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
4.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	29.987.659	27.487.659	91%	100%
5.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	29.966.047	25.466.041	84%	100%
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	1.402.150.090	1.336.589.539	96%	100%
6.	Program Pemerdayaan dan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	271.198.609	271.198.607	100%	100%

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kabupaten Purwakarta				
--------------------------------------	---	--	--	--	--

No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	72.754.116	66.193.400	90%	100%
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	39.752.486	33.602.486	84%	100%
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di daerah	485.942.895	444.264.610	91%	100%
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di daerah	553.703.850	541.402.550	97%	100%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,	2.398.966.875	2.006.720.335	84%	100%	

	Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pembatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan				
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	700.001.623	600.264.623	85%	100%

**Tabel 2.2**  
**REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA 2021**

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program ( Tahun 2018-2023 )	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Yang Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % )
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	0,02	01		<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta</b>									
1	05													
1					<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>									
1	01	05	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
1	01	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	64,27%	64,27%	64,27%	100%	64,27%	100%
1	01	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	51,28%	51,28%	51,28%	100%	51,28%	100%



1	01	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	99,95%	99,95%	99,95%	100%	99,95%	100%
1	01	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	99,70%	99,70%	99,70%	100%	99,70%	100%
1	01	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	100%	70%	70%	70%	100%	70%	100%
1	01	05	01	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	99,64%	99,64%	99,64%	100%	99,64%	100%
1	01	05	01	23	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga PTT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	01	25	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	100%	100%	60%	60%	60%	100%	60%	100%
1	01	05	01	27	Festival Purwakarta Istimewa		100%	100%	0%	0%	-	-	-	-
1	01	05	01	32	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	01	33	Fasilitasi Keberangkatan Ormas, LSM dan Forum-Forum Ke Luar Daerah	Jumlah Fasilitasi Keberangkatan Ormas, LSM dan Forum-Forum Ke Luar Daerah	100%	100%	0%	0%	-	-	-	-

1	01	05	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>										
1	01	05	02	07	Pengadaan Perelengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perelengkapan Gedung Kantor	100%	100%	0%	0%	-	-	-	-	-
1	01	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	99,62%	99,62%	99,62%	100%	99,62%	100%	100%
1	01	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	100%	99,91%	99,91%	99,91%	100%	99,91%	100%	100%
1	01	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	86,15%	86,15%	86,15%	100%	86,15%	100%	100%
1	01	05	02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	94,88%	94,88%	94,88%	100%	94,88%	100%	100%
1	01	05	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										

1	01	05	06	01	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	06	06	Penyusunan Rencana Pelaporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Jumlah Penyusunan Rencana Strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	06	07	Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	1	5	6	8	Premi Asuransi Pegawai Non PNS	Jumlah Premi Asuransi Non PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	06	10	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	15		<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>									
1	01	05	15	07	Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Jumlah Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	100%	100%	0%	0%	-	-	-	-
1	01	05	15	08	Monitoring Evaluasi Belanja Bantuan Hibah dan Sosial	Jumlah Monitoring Evaluasi Belanja Bantuan Hibah dan Sosial	100%	100%	0%	0%	-	-	-	-

1	01	05	17		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>									
1	01	05	17	13	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Jumlah Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	17	14	Saresehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Saresehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	0%	0%	-	-	-	-
1	01	05	17	15	Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	17	17	Jambore Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar	Jumlah Jambore Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar	100%	100%	0%	0%	-	-	-	-
1	01	05	17	18	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	Jumlah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	100%	100%	97,72%	97,72%	97,72%	100%	97,72%	100%
1	01	05	17	20	Pelatihan Kader Bangsa	Jumlah Pelatihan Kader Bangsa	100%	100%	0%	0%	-	-	-	-
1	01	05	19		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>									
1	01	05	19	02	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( FORKOPIMDA ) Kabupaten Purwakarta	Jumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( FORKOPIMDA ) Kabupaten Purwakarta	100%	100%	88,84%	88,84%	88,84%	100%	88,84%	100%

1	01	05	19	03	Forum Komunikasi Aparat Intelijen Kabupaten Purwakarta	Jumlah Forum Komunikasi Aparat Intelijen Kabupaten Purwakarta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	19	04	Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Purwakarta	Jumlah Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Purwakarta	100%	100%	99,25%	99,25%	99,25%	100%	99,25%	100%
1	01	05	19	05	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purwakarta	Jumlah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purwakarta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	19	06	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM )	Jumlah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM )	100%	100%	0%	0%	-	-	-	-
1	01	05	19	07	Pengawasan Orang Asing	Jumlah Pengawasan Orang Asing	100%	100%	88,33%	88,33%	88,33%	100%	88,33%	100%
1	01	05	19	08	Satgas Toleransi Kabupaten Purwakarta	Jumlah Satgas Toleransi Kabupaten Purwakarta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	05	19	09	Pendidikan Bela Negara	Jumlah Pendidikan Bela Negara	100%	100%	99,99%	99,99%	99,99%	100%	99,99%	100%
1	01	05	19	10	Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Jumlah Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	100%	100%	4%	4%	4%	100%	4%	100%
1	01	05	19	12	Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( TP4GN) Kabupaten Purwakarta	Jumlah Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( TP4GN) Kabupaten Purwakarta	100%	100%	0%	0%				

1	01	05	21		<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>									
1	01	05	21	06	Monev Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Yang Duduk d DPRD	Jumlah Monev Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Yang Duduk d DPRD	100%	100%	0%	0%				
1	01	05	21	08	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Tingkat Kabupaten Purwakarta	Jumlah Peningkatan Pemahaman Bagi Pengurus Parpol Yang Menerima Bantuan	100%	100%	0%	0%				
1	01	05	21	09	Peningkatan Pemahaman Bagi Pengurus Parpol Yang Menerima Bantuan	Jumlah Pusat Informasi Pemilu 2019	100%	100%	0%	0%				
1	01	05	21	11	Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah	Jumlah Tim Pemantuan Perkembangan Politik Daerah	100%	100%	0%	0%				

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 Pasal 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor
- b. Kasubbag Tata Usaha
- c. Seksi Ideologi Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama
- d. Seksi Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan adalah:

(1) Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

- dengan tugas dan fungsinya.
- f. merumuskan perencanaan kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - g. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - h. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan;
  - i. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
  - j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - k. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - l. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
  - m. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - n. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
  - o. merumuskan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga yang meliputi kelembagaan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
  - p. merumuskan kebijakan dibidang kesatuan bangsa yang meliputi pembauran dan wawasan kebangsaan;
  - q. mengoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis operasional untuk pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
  - r. melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;



- s. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. menerima dan menindak lanjuti informasi serta data dalam lingkup Badan Kesatuan bangsa dan politik ;
- u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- v. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Tata Usaha

Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaporan Serta Memberikan Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Hukum, Keuangan Dalam Lingkungan Badan.

- a. Pengelola Program dan Laporan
- b. Bendahara
- c. Pengelola Keuangan
- d. Analisis Program Keuangan dan Pelaporan
- e. Pengelola Kepegawaian
- f. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
- g. Pengadministrasi Persuratan
- h. Pranata Kearsipan
- i. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- j. Pengadministrasi Umum
- k. Administrasi Sarana dan Prasarana
- l. Pengelola Gaji

(3) Seksi Ideologi Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bineka

## Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- a. Pengadministrasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - b. Analisis Wawasan Kebangsaan
  - c. Pengelola Wawasan Kebangsaan
  - d. Pengadministrasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
  - e. Analisis Perlindungan Sumber Daya
  - f. Pengelola Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- (4) Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- a. Analisis Politik Dalam Negeri
  - b. Pengelola Monitoring dan Evaluasi
  - c. Pengadministrasi Umum
  - d. Analisis Organisasi Kemasyarakatan
  - e. Pengelola Organisasi Kemasyarakatan
- (5) Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah
- a. Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
  - b. Pengelola Data Intelijen
  - c. Pengadministrasi Umum
  - d. Pengelola Penanganan Konflik
  - e. Penyuruh Penanganan Konflik

Indikator kinerja pelayanan berdasar pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023. Capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## Kabupaten Purwakarta

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Proyeksi		Catatan Analisis
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	
1	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran			Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	100	100	100	100	100	73%	86%	100%					
2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Kebangsaan Masyarakat			Tingkat Pemenuhan Dukungan Pendidikan Politik Masyarakat	100	100	100	100	100	16%	92%	80%					
				Tingkat Pemenuhan Dukungan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100	100	100	100	100	66%	93%	80%					
				Tingkat Pemenuhan Dukungan Kewaspadaan Dini Daerah	100	100	100	100	100	90%	0%	80%					

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi beberapa isu-isu penting sebagai berikut:

- 1) Tingkat pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih rendah, sebagai akibat dari adanya keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.
- 2) Kurangnya tenaga profesional yang paham dalam bidang tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan politik.
- 3) Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan :
  1. Menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air.
  2. Menyebarnya ideologi / faham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila
  3. Meningkatnya radikalisme
  4. Intoleransi antar agama
  5. Sparatisme dan Terorisme
  6. Konflik SARA
  7. Tergerusnya karakter / jatidiri bangsa dan kearifan lokal
  8. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia
  9. Pengaruh negatif globalisasi dan kecanggihan teknologi telekomunikasi / keterbukaan mengakses informasi yang tidak di imbangi kemampuan menangkal atau meng-*conter* informasi negatif tsb.
- 4) Belum optimalnya sinergisitas dan koordinasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- 5) 5.Tingginya kuantitas keberadaan kelompok masyarakat dalam berserikat dan berkumpul yang diwadahi melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang belum dapat

diimbangi dengan kualitas keberdayaan Ormas yang baik, sehingga memunculkan kondisi/aktivitas Ormas yang kurang produktif/cenderung melanggar peraturan perundang-undangan.

- 6) Penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum.
- 7) Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan narkoba dikarenakan belum optimalnya penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Badan kesatuan Bangsa dan Politik:

Tabel 2.4

## PERUBAHAN ANGGARAN RENJA RKPD TAHUN 2022

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>6.159.404.922</b>					<b>6.159.404.922</b>	
	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>				<b>135.548.000</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>				<b>400.000.000</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Purwakarta			<b>400.000.000</b>	Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Purwakarta			<b>400.000.000</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Purwakarta	terpenuhinya peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan pembaruan bangsa bagi LMS, ORMAS, Guru dan Pelajar	5 dokumen	400.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran /van Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Purwakarta	terpenuhinya peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan pembaruan bangsa bagi LMS, ORMAS, Guru dan Pelajar	5 dokumen	<b>400.000.000</b>	
	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	Purwakarta			<b>1.664.987.691</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	Purwakarta			<b>1.664.987.691</b>	

<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Purwakarta			<b>1.664.987.691</b>	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Purwakarta			<b>1.664.987.691</b>	
Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Purwakarta	Tersedianya pendidikan politik bagi masyarakat, pemilih pemula, bimbingan bagi pengurus partai	4 dokumen	1.843.196.841	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Purwakarta	Tersedianya pendidikan politik bagi masyarakat, pemilih pemula, bimbingan bagi pengurus partai	4 dokumen	1.843.196.841	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Purwakarta	Tercapainya stabilitas politik yang aman dan kondusif	2 dokumen	19.803.250	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Purwakarta	Tercapainya stabilitas politik yang aman dan kondusif	2 dokumen	19.803.250	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Purwakarta			<b>185.088.800</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Purwakarta			<b>185.088.800</b>	
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Purwakarta			<b>185.088.800</b>	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Purwakarta			<b>185.088.800</b>	

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Purwakarta	Pemberdayaan dan pengawasan serta terjalannya koordinasi antara lembaga dan ORMAS/LSM	3 dokumen	185.088.800	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Purwakarta	Pemberdayaan dan pengawasan serta terjalannya koordinasi antara lembaga dan ORMAS/LSM	3 dokumen	185.088.800
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Purwakarta			<b>277.026.350</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Purwakarta			<b>277.026.350</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</b>	Purwakarta			<b>277.026.350</b>	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Purwakarta			<b>277.026.350</b>
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Purwakarta	Persentase pengetahuan wawasan kebangsaan dan pengamanan hari-hari tertentu	3 dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Purwakarta	Persentase pengetahuan wawasan kebangsaan dan pengamanan hari-hari tertentu	3 dokumen	50.000.000
Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Purwakarta	Kualitas pengawasan bantuan hiba, pembinaan masyarakat dalam mengeliminasi intoleransi serta pemberantasan narkoba	3 dokumen	11.530.250	Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Purwakarta	Kualitas pengawasan bantuan hiba, pembinaan masyarakat dalam mengeliminasi intoleransi serta pemberantasan narkoba	3 dokumen	11.530.250
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Purwakarta	Kualitas pengawasan bantuan hiba, pembinaan masyarakat dalam mengeliminasi intoleransi serta pemberantasan narkoba	3 dokumen	215.496.100	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Purwakarta	Kualitas pengawasan bantuan hiba, pembinaan masyarakat dalam mengeliminasi intoleransi serta pemberantasan narkoba	3 dokumen	215.496.100



<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Purwakarta			<b>963.801.200</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Purwakarta			<b>963.801.200</b>	
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Purwakarta</b>			<b>963.801.200</b>	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Purwakarta			<b>963.801.200</b>	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Purwakarta	Kualitas penyelenggaraan kegiatan dalam upaya menjaga komunikasi, keamanan, ketertiban pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Purwakarta	4 dokumen	250.548.950	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Purwakarta	Kualitas penyelenggaraan kegiatan dalam upaya menjaga komunikasi, keamanan, ketertiban pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Purwakarta	4 dokumen	250.548.950	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	purwakarta	kualitas tim kewaspadaan dini dan pencegahan, penanganan terhadap gangguan keamanan dalam negeri	2 Dokumen	218.516.750	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Purwakarta	kualitas tim kewaspadaan dini dan pencegahan, penanganan terhadap gangguan keamanan dalam negeri	2 Dokumen	218.516.750	

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Kualitas Penyelenggaraan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Kegiatan	494.735.500	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Kualitas Penyelenggaraan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Kegiatan	494.735.500	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Purwakarta				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Purwakarta				
<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Purwakarta</b>			<b>10.000.200</b>	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta			<b>10.000.200</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Tersedianya kualitas kebutuhan dokumen restra dan renja yang diperlukan	1 dokumen	4.991.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Tersedianya kualitas kebutuhan dokumen restra dan renja yang diperlukan	1 dokumen	4.991.400	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	kualitas kebutuhan dokumen laporan akhir kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang dibutuhkan	1 dokumen	5.008.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	kualitas kebutuhan dokumen laporan akhir kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang dibutuhkan	1 dokumen	5.008.800	
<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Purwakarta</b>			<b>1.739.943.670</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>	Purwakarta			<b>1.739.943.670</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.734.936.070	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.734.936.070	
koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Tersedianya Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	5.007.600	Tersedianya Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	5.007.600	

<b>Administrasi Umum</b>	<b>Purwakarta</b>			<b>292.432.896</b>	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Purwakarta</b>			<b>292.432.896</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	Tersedianya Penyediaan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	11 Bulan	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purwakarta	Tersedianya Penyediaan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	11 Bulan	20.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kesbangpol	1 Dokumen	60.259.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purwakarta	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kesbangpol	1 Dokumen	60.259.400	
Penyediaan Alat Rumah Tangga	Purwakarta	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Dokumen	19.996.700	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Purwakarta	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Dokumen	19.996.700	
Penyediaan Bahan Logistik	Purwakarta	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	11 Bulan	71.902.746	Penyediaan Bahan Logistik	Purwakarta	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	11 Bulan	71.902.746	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	60.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Purwakarta	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan	60.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Terfasilitasinya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	10.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Purwakarta	Terfasilitasinya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	10.100.000	
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	TerFasilitasinya Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	50.174.000	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	TerFasilitasinya Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	50.174.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Purwakarta	Terfasilitasinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Purwakarta	Terfasilitasinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		0	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Purwakarta</b>			<b>5.007.600</b>		<b>Purwakarta</b>			<b>5.007.600</b>	

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Purwakarta	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Miik Daerah	1 dokumen	5.007.600	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Purwakarta	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Miik Daerah	1 dokumen	5.007.600
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Purwakarta</b>					<b>Purwakarta</b>			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapanya	Purwakarta	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Kesbangpol Beserta Perlengkapanya		0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapanya	Purwakarta	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Kesbangpol Beserta Perlengkapanya		0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Purwakarta</b>			<b>634.098.565</b>		<b>Purwakarta</b>			<b>634.098.565</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	Tersedianya Jasa Surat Menyurat/Materai	11 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	Tersedianya Jasa Surat Menyurat/Materai	11 Dokumen	10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	65.498.565	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	65.498.565
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kesbangpol	13 Bulan	558.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purwakarta	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kesbangpol	13 Bulan	558.600.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Purwakarta</b>			<b>73.260.000</b>		<b>Purwakarta</b>			<b>73.260.000</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Purwakarta	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Kesangpol dan Bangunan Lainnya	1 Dokumen	32.040.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Purwakarta	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Kesangpol dan Bangunan Lainnya	1 Dokumen	32.040.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11 Bulan	15.320.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Purwakarta	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11 Bulan	15.320.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Purwakarta	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	1 Dokumen	25.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Purwakarta	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	1 Dokumen	25.900.000	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat di peroleh melalui kegiatan musrenbang dimulai pada tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Musrenbang ini berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Program dan kegiatan tersebut yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Adapun Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Purwakarta guna mendukung program prioritas pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini.
- 2) Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela Negara kepada masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan pengawasan dan pemberdayaan ormas.
- 4) Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat dirumuskan tujuan yaitu: "Menciptakan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan", dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta forum-forum dalam rangka deteksi dini,
2. Meningkatnya nilai-nilai wawasan kebangsaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran bela Negara.
3. Terciptanya kerukunan antar dan intra umat beragama dan pembauran kebangsaan,
4. Optimalnya Pengawasan melalui pendataan serta pemberdayaan ormas,
5. Meningkatnya pendidikan politik bagi masyarakat (Pemilih Pemula) dan Partai politik

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

**Tabel 3.3**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA**

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8					<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>								
8	1				<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>6.159.404.922</b>				<b>6.775.345.414</b>
8	1	2			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>				<b>135.548.800</b>				<b>149.103.680</b>
8	1	2	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>				<b>135.548.800</b>				<b>149.103.680</b>
8	1	2	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	terpenuhinya peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan pembaruan bangsa bagi LMS, ORMAS, Guru dan Pelajar	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	5 Dokumen	<b>135.548.800</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5 Dokumen	<b>149.103.680</b>



8	1	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>									1.843.196.841					2.027.516.525
8	1	3	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>									1.843.196.841					1.843.196.841
8	1	3	2,01	4	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya pendidikan politik bagi masyarakat, pemilih pemula, bimbingan bagi pengurus partai	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	4 Dokumen		1.823.393.591	PENDAPATAN ASLI DAERAH		4 Dokumen						2.005.732.950

8	1	3	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tercapainya stabilitas politik yang aman dan kondusif	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	2 Dokumen	19.803.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 Dokumen	21.783575
8	1	4			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>				<b>185.088.800</b>			<b>203.597.680</b>
8	1	4	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>				<b>185.088.800</b>			<b>203.597.680</b>
8	1	4	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan dan pengawasan serta terjalannya koordinasi antara lembaga dan ORMAS/LSM	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	3 Dokumen	<b>185.088.800</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3 Dokumen	<b>203.597.680</b>

8	1	5			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>				277.026.350				304.728.985
8	1	5	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</b>				277.026.350				304.728.985
8	1	5	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase pengetahuan wawasan kebangsaan dan pengamanan hari-hari tertentu	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Kegiatan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Kegiatan	51.000.000
8	1	5	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kualitas pengawasan bantuan hiba, pembinaan masyarakat dalam mengeliminasi intoleransi serta pemberantasan narkoba	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	3 Dokumen	11.530.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3 Dokumen	12.683.275

8	1	5	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Kualitas Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	3 Dokumen	215.496.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3 Dokumen	237.045.710
8	1	6			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>				<b>963.801.200</b>			<b>1.060.181.320</b>
8	1	6	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>				<b>963.801.200</b>			<b>1.060.181.320</b>
8	1	6	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kualitas penyelenggaraan kegiatan dalam upaya menjaga komunikasi, keamanan, ketertiban pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Purwakarta	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	4 Dokumen	250.548.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4 Dokumen	275.603.845

8	1	6	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kualitas tim kewaspadaan dini dan pencegahan, penanganan terhadap gangguan keamanan dalam negeri	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	2 Dokumen	218.516.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 Dokumen	240.368.425
8	1	6	2,01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Penyelenggaraan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	12 Kegiatan	494.735.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12 Kegiatan	544.209.050
8	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>							
8	1	1	2,01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>10.000.200</b>			<b>11.000.220</b>
8	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	2 Dokumen	4.991.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 Dokumen	5.490.540
8	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	kualitas kebutuhan dokumen laporan akhir kinerja instansi	Kab. Purwakarta,	1 Dokumen	5.008.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Dokumen	5.509.680

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	pemerintah (LAKIP) yang dibutuhkan	Purwakarta, Nagri Kaler						
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan</b>				<b>1.739.943.670</b>				<b>1.913.938.037</b>
8	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	14 Bulan	1.734.936.070	PENDAPATAN ASLI DAERAH		14 Bulan	1.908.429.677
8	1	1	2,02	5	koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	5.007.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	5.508.360

<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>292.432.896.</b>				<b>321.676.185</b>
8	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	11 Bulan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		11 Bulan	22.000.000
8	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kesbangpol	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	60.259.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	66.285.340
8	1	1	2,06	3	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	19.996.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	21.996.370
8	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	11 Bulan	71.902.746	PENDAPATAN ASLI DAERAH		11 Bulan	79.093.020

8	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	12 Bulan	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Bulan	66.000.000
8	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	12 Bulan	10.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Bulan	11.110.000
8	1	1	2,06	9	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	12 Bulan	50.174.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Bulan	55.191.400
8	1	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Terfasilitasinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	-	0	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>				<b>5.007.600</b>				<b>5.508.360</b>
8	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Miik Daerah	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	5.007.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	5.508.360
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
8	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Kesbangpol Beserta Perlengkapannya	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	0
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>634.098.565</b>				<b>697.508.421</b>

8	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat/Materai	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	11 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		11 Dokumen	11.000.000
8	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	12 Bulan	65.498.565	PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Bulan	72.048.443
8	1	1	2,8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kesbangpol	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	13 Bulan	558.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		13 Bulan	614.460.000
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>73.260.000</b>				<b>80.586.000</b>
8	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Kesangpol dan Bangunan Lainnya	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	32.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	35.244.000
8	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	11 Bulan	15.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		11 Bulan	16.852.000
8	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	25.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	28.490.000



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indicator Kinerja dan pagu indikatif, yang disajikan dalam tabel 4.1, sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA**

Kode				Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
8				<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>								
8	1			<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>6.159.404.922</b>				<b>6.775.345.414</b>
8	1	2		<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>				<b>135.548.800</b>				<b>149.103.680</b>
8	1	2	2,01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>				<b>135.548.800</b>				<b>149.103.680</b>

8	1	2	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	terpenuhinya peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan pembaruan bangsa bagi LMS, ORMAS, Guru dan Pelajar	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	5 Dokumen	135.548.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5 Dokumen	149.103.680
8	1	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>				<b>1.843.196.841</b>			<b>1.831.486.460</b>
8	1	3	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>				<b>1.843.196.841</b>			<b>1.831.486.460</b>

8	1	3	2,01	4	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya pendidikan politik bagi masyarakat, pemilih pemula, bimbingan bagi pengurus partai	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	4 Dokumen	1.823.393.591	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4 Dokumen	1.611.486.460
8	1	3	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tercapainya stabilitas politik yang aman dan kondusif	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	2 Dokumen	19.803.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 Dokumen	220.000.000
8	1	4			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>				<b>185.088.800</b>			<b>203.597.680</b>
8	1	4	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan				<b>185.088.800</b>			<b>203.597.680</b>

					<b>Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>								
8	1	4	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan dan pengawasan serta terjalannya koordinasi antara lembaga dan ORMAS/LSM	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	3 Dokumen	185.088.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH		3 Dokumen	203.597.680

8	1	5			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>				277.026.350				304.728.985
8	1	5	2,01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</b>				277.026.350				304.728.985
8	1	5	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase pengetahuan wawasan kebangsaan dan pengamanan hari-hari tertentu	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Kegiatan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Kegiatan	51.000.000

8	1	5	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kualitas pengawasan bantuan hiba, pembinaan masyarakat dalam mengeliminasi intoleransi serta pemberantasan narkoba	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	3 Dokumen	11.530.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3 Dokumen	12.683.275
8	1	5	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Kualitas Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	3 Dokumen	215.496.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3 Dokumen	237.045.710
8	1	6			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>				<b>963.801.200</b>			<b>1.060.181.320</b>
8	1	6	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				<b>963.801.200</b>			<b>1.060.181.320</b>

8	1	6	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kualitas penyelenggaraan kegiatan dalam upaya menjaga komunikasi, keamanan, ketertiban pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Purwakarta	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	4 Dokumen	250.548.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4 Dokumen	275.603.845
8	1	6	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kualitas tim kewaspadaan dini dan pencegahan, penanganan terhadap gangguan keamanan dalam negeri	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	2 Dokumen	218.516.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 Dokumen	240.368.425
8	1	6	2,01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Penyelenggaraan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	12 Kegiatan	494.735.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12 Kegiatan	544.209.050
8	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>							





8	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	11 Bulan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		11 Bulan	22.000.000
8	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kesbangpol	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	60.259.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	66.285.340
8	1	1	2,06	3	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	19.996.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	21.996.370
8	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	11 Bulan	71.902.746	PENDAPATAN ASLI DAERAH		11 Bulan	79.093.020
8	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	12 Bulan	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Bulan	66.000.000
8	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	12 Bulan	10.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Bulan	11.110.000
8	1	1	2,06	9	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	12 Bulan	50.174.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Bulan	55.191.400
8	1	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Terfasilitasinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler		0				-


8	1	1	2,03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>				5.007.600				5.508.360
8	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Miik Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	5.007.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	5.508.360
8	1	1	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
8	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Kesbangpol Beserta Perlengkapannya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	0
8	1	1	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				634.098.565				697.508.421
8	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat/Materai	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	11 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		11 Dokumen	11.000.000
8	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	12 Bulan	65.498.565	PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Bulan	72.048.443
8	1	1	2,8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Kesbangpol	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	13 Bulan	558.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		13 Bulan	614.460.000
8	1	1	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				73.260.000				80.586.000

8	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Kesangpol dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	32.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	35.244.000
8	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	11 Bulan	15.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		11 Bulan	16.852.000
8	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1 Dokumen	25.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	28.490.000

**BAB V**  
**PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, RENSTRA OPD 2018 - 2023 dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Demikian RENJA 2022 disusun serta dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 yang akan dicapai nantinya.

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Purwakarta**

  
**Dr. Hj Nur Alsah Jamil, S.Ag., M.Pd**  
**NIP. 19740525 200801 2 002**